

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis pada dekade terakhir ini banyak di pengaruhi oleh adanya perubahan pada keadaan lingkungan ekonomi. Perubahan tersebut telah menimbulkan suatu paradigma yang baru di dunia bisnis yang pada awalnya *profit oriented only* menjadi berorientasi pada tiga hal yaitu *profit*, *planet*, dan *people* atau disebut *Triple-P Bottom Line*. Artinya, dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan saat ini harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dan tidak hanya mencari laba saja. (Priantinah, 2012) mengungkapkan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Kemungkinan terjadinya masalah sosial dan lingkungan yang di akibatkan oleh banyaknya aktivitas perusahaan, maka sudah selayaknya perusahaan-perusahaan tersebut bersedia untuk menyajikan laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi perusahaan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekelilingnya. (Putra, 2011) Permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia juga terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, perimbangan bagi hasil suatu industri

dalam era otonomi daerah. Banyak masyarakat yang mengeluh atas pencemaran lingkungan akibat limbah atau polusi yang di sebabkan suatu industri sehingga menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh respon yang baik dari masyarakat perusahaan harus transparan terhadap kegiatan sosialnya yang nantinya akan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat dan meningkatkan nilai eksistensi terhadap perusahaan. Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar nantinya kegiatan dan kinerja perusahaan mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Definisi yang ditulis sebuah organisasi dunia *World Bisnis Council for Sustainable Development* (1996) menyatakan bahwa CSR (*Corporate social responsibility*) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya, beserta seluruh keluarga. (Sari, 2012)

Pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah konsep penting untuk dilaksanakan perusahaan. Ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investor (Cheng, 2011). Pemerintah melalui undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain tentang

CSR adalah UU no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh kasus tentang CSR yang tidak tepat sasaran adalah PT Unilever. PT Unilever melalui program budi daya tanaman Nilam, bukannya menguntungkan malah membuat warga Nagori Boluk, , Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara merugi puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi karena diduga melalui Humasnya Ganda Simanjuntak tidak profesional dalam mengolah dana CSR sehingga warga malah mengalami kerugian materi. Lahan yang tadinya ditanami Nilam seluas satu hektar berubah menjadi tanaman ubi kayu dan jagung menggantikan Nilam yang gagal dan menelan anggaran puluhan juta rupiah. Gubuk dan tempat menyimpan peralatan pompa air juga masih tampak uuh di areal perladangan warga, kegagalan budi daya Nilam di Nagori Boluk karena pengolahannya dilakukan langsung masyarakat tanpa adanya pendampingan dari tenaga profesional seara rutin. Humas Ganda Simanjuntak tidak menjelaskan kegagalan secara rinci. Melainkan hanya berkutat tentang keuntungan menanam nilam dan keberhasilan yang dicapai saat melakukan eksperimen budi daya Nilam di beberapa daerah (lassernewtoday.com)

Hal yang mempengaruhi CSR juga tidak hanya dari sosial saja namun juga dari sektor pajak. Permasalahan pajak sudah dari dulu di alami oleh negara tak terkecuali di Indoneisa. Didalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tapi bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu sudah menjadi hal wajar jika perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Tindakan manajemen yang terencana untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal umum di kalangan perusahaan di seluruh dunia (Lanis, 2013)b. Dari faktor faktor diatas masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan *Corporate social responsibility* (CSR).

Faktor yang pertama adalah agresivitas pajak, agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat lazim dikalangan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Tindakan ini bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Hal ini seperti yang diungkapkan (Balakrishnan, 2017) bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang diperkirakan. Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardhani (2017) menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2014) yang menunjukkan agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Faktor yang ke dua adalah ukuran perusahaan, Secara umum perusahaan besar akan menjelaskan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini sebab perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari desakan politis, yaitu desakan untuk mengerjakan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih banyak adalah pengurangan biaya politis untuk perusahaan (Hasibuan, 2001). Besar Kecilnya dapat dilihat berdasarkan pada jumlah aktiva, volume penjualan, jumlah tenaga kerja dan kapitalisasi pasar (Noor, 2016). Pengukuran ini dilaksanakan untuk memahami semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula tanggung jawab sosial yang mungkin akan diungkapkan perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Mandaika (2015) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor yang ke tiga adalah profitabilitas, pengukuran profitabilitas dapat sekian banyak macam seperti : Laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva. Dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. (Wardhani, 2017) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas mengindikasikan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan Laba. Keuntungan yang layak diberikan untuk pemegang saham ialah keuntungan sesudah bunga dan pajak.

Semakin besar keuntungan yang didapatkan semakin besar ketrampilan perusahaan guna membayarkan dividennya dan semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menampilkan pengungkapan CSR lebih banyak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2013) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil penelitian Wardhani (2017) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Faktor yang ke empat adalah *leverage*, *leverage* adalah rasio yang digunakan mengukur seberapa besar perusahaan mempunyai ketergantungan pada kreditur dalam mengongkosi aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi berarti memiliki ketergantungan pada pinjaman dari luar dalam memberikan biaya pada asetnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* rendah lebih sedikit membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* perusahaan, dengan demikian mencerminkan risiko finansial perusahaan. Tambahan informasi dibutuhkan untuk membuang keraguan pemegang obligasi atas dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2016) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sunaryo (2016) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR

Faktor selanjutnya adalah kepemilikan saham publik, kepemilikan saham publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki

hubungna istimewa dengan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga banyak pula item-item informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Nugraheni, 2012). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deva (2017) kepemilikan saham publik menunjukkan hasil yang positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) menunjukkan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan memunculkan pendapat yang beragam dan menarik untuk di kaji lebih dalam. Hasil yang beragam tersebut dikarenakan oleh model yang telah berkembang yang merupakan model yang sederhana dan pengukuran yang digunakan juga tidak konsisten.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardhani (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian Wardhani (2017) terletak pada variabel independen dimana peneliti menambah variabel *leverage* dan kepemilikan saham publik. Perbedaan yang kedua adalah objek penelitian dimana peneliti sebelumnya berobjek pada perusahaan manufaktur di penelitian ini peneliti menggunakan objek perusahaan barang konsumsi. Dan perbedaan yang ke tiga adalah periode penelitian. Penelitian yang

dilakukan Wardhani menggunakan periode 2 tahun sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 4 tahun.

Dari bermacam-macam fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, bahkan bertentangan dengan hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lainnya. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan judul :”**Analisis Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari tahun 2014-2017. Penggunaan data pada tahun 2014-2017 berkaitan dengan laporan tahunan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah di audit dan dipublikasikan.
2. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen : Agresivitas pajak, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan kepemilikan saham publik, dan variabel dependen yaitu : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*?
2. Apakah ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*?
5. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut di atas antara lain:

1. Menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.

2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.
3. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.
4. Menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.
5. Menguji pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responcibility*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan
2. Bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi, untuk menambah studi literatur mengenai pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR), serta memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya dibidang yang sama.
3. Bagi pihak perusahaan, untuk memberikan masukan dan motivasi bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.
4. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan mengidentifikasi resiko agresivitas pajak
5. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh